



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kearsipan perlu ditetapkan peraturan tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

7. Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

12. Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di unit pengolah.
13. Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif di unit kearsipan.
14. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis ke Lembaga Kearsipan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
- b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan JRA urusan Pemerintah Daerah; dan
- e. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II KLASIFIKASI ARSIP Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua Kode Klasifikasi Arsip

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 5

- (1) JRA terdiri dari:
 - a. JRA fasilitatif; dan
 - b. JRA substantif.
- (2) JRA fasilitatif dan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis arsip;
 - b. jangka waktu penyimpanan, yaitu:
 1. aktif; dan
 2. inaktif.
 - c. Keterangan, yaitu:
 1. musnah;
 2. dinilai kembali; dan
 3. permanen.
- (3) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) JRA Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. umum:
 1. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 2. perlengkapan;
 3. pengadaan;
 4. perpustakaan;
 5. kearsipan;
 6. persandian;
 7. perencanaan pembangunan;
 8. Organisasi dan Tata Laksana; dan
 9. penelitian, pengkajian, dan pengembangan.
 - b. pemerintahan:
 1. otonomi daerah;
 2. pemerintahan umum; dan
 3. hukum.
 - c. politik:
 1. kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. pemilu.
 - d. keamanan dan ketertiban:
 1. satuan polisi pamong praja; dan
 2. penanggulangan bencana, pencarian, dan pertolongan.
 - e. kesejahteraan rakyat:
 1. pembangunan daerah tertinggal;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pendidikan;
 4. keolahragaan;
 5. kepemudaan;
 6. kebudayaan;
 7. kesehatan;
 8. agama dan kepercayaan;
 9. sosial;
 10. pemberdayaan masyarakat desa;
 11. pertamanan dan pemakaman;
 12. kependudukan dan catatan sipil;

13. keluarga berencana; dan
 14. hubungan masyarakat.
- f. perekonomian:
1. ketahanan pangan;
 2. perdagangan;
 3. koperasi dan usaha kecil menengah;
 4. kehutanan;
 5. kelautan dan perikanan;
 6. pertanian;
 7. peternakan;
 8. perkebunan;
 9. perindustrian;
 10. energi dan sumber daya mineral;
 11. perhubungan;
 12. komunikasi dan informatika;
 13. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 14. statistik;
 15. ketenagakerjaan;
 16. penanaman modal;
 17. pertanahan; dan
 18. transmigrasi.
- g. pekerjaan umum dan ketenagaan:
1. pekerjaan umum;
 2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 3. tata ruang (tata kota); dan
 4. lingkungan hidup.
- h. pengawasan:
1. pengawasan internal.
- i. kepegawaian:
1. sumber daya manusia; dan
 2. pendidikan dan pelatihan.
- j. keuangan:
1. keuangan daerah.

Pasal 7

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 38) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 November 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 November 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- 000 UMUM
 - 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
 - 000.1.1 Telekomunikasi
 - 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
 - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
 - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
 - 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
 - 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
 - 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
 - 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
 - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
 - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
 - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
 - 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
 - 000.1.8.2 Penghijauan
 - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
 - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
 - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
 - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
 - 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
 - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
 - 000.1.9.2 Pemasangan
 - 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
 - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
 - 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
 - 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
 - 000.2 PERLENGKAPAN
 - 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
 - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
 - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
 - 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
 - 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
 - 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
 - 000.2.3 Distribusi
 - 000.2.3.1 Barang habis pakai
 - 000.2.3.2 Barang milik daerah

- 000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
- 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
- 000.3 PENGADAAN
 - 000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
 - 000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
 - 000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
 - 000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
 - 000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
 - 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi
- 000.4 PERPUSTAKAAN
 - 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
 - 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
 - 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
 - 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
 - 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog
 - 000.4.3 Koleksi Pustaka
 - 000.4.3.1 Pembelian
 - 000.4.3.2 Hibah
 - 000.4.3.3 Hadiah
 - 000.4.3.4 Tukar Menukar
 - 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
 - 000.4.3.6 Terbitan Internal
 - 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
 - 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
 - 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
 - 000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
 - 000.4.6 Layanan Perpustakaan
 - 000.4.6.1 Keanggotaan
 - 000.4.6.2 Peminjaman
 - 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
 - 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
 - 000.4.7.1 MoU

- 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
- 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
- 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
 - 000.4.8.1 Pengembangan situs web
 - 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
 - 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
 - 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital
- 000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
- 000.4.10 Konservasi
 - 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
 - 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan
- 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.4.12 Transformasi Digital
- 000.4.13 Kurasi Digital
- 000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
 - 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
 - 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
 - 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
 - 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 000.5 KEARSIPAN
 - 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
 - 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
 - 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
 - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
 - 000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
 - 000.5.2.5 Data Base Arsiparis
 - 000.5.2.6 Bimbingan Konsultasi Kearsipan
 - 000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
 - 000.5.2.8 Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
 - 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
 - 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
 - 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
 - 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)

- 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
- 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
- 000.5.3.4 Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
- 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
- 000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)
- 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
- 000.5.6 Penyusutan Arsip
 - 000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
 - 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.
 - 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
- 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan)
 - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

- 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkrip)
- 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
- 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
- 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media))
- 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip statis)
- 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
- 000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
- 000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
 - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
 - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
 - 000.5.15.3 Sanksi
- 000.6 PERSANDIAN
 - 000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 000.6.2 Pengamanan persandian
 - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
 - 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
 - 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
 - 000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
 - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
 - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
 - 000.6.3.3 Pelaksanaan
 - 000.6.3.4 Pelaporan
 - 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
 - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
 - 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
 - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
 - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
 - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
 - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
 - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
 - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 - 000.6.5.7 Pelaporan

- 000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 - 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan /Musrenbang
 - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
 - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
 - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
 - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
 - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
 - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
 - 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
 - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
 - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
 - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
 - 000.7.2.8 Laporan Berkala
 - 000.7.2.9 Laporan Insidental
 - 000.7.2.10 Evaluasi Program
 - 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
 - 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
 - 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
 - 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
 - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
 - 000.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
 - 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.7.6.5 Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
 - 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
 - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
 - 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
 - 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
 - 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
 - 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
- 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
 - 000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
 - 000.8.1.1 Pembentukan
 - 000.8.1.2 Pengubahan
 - 000.8.1.3 Pembubaran
 - 000.8.2 Uraian Jabatan
 - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
 - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
 - 000.8.3 Ketatalaksanaan
 - 000.8.3.1 Proses Bisnis
 - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
 - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
 - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
 - 000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
 - 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
 - 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
 - 000.8.6.1 Budaya Kerja
 - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

- 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN
 - 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
 - 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi : rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi.
 - 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan.
 - 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan.
 - 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 000.9.6.1 Data
 - 000.9.6.2 Statistik
 - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
 - 000.9.7 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKi)
 - 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
 - 000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop
- 100 PEMERINTAHAN
 - 100.1 OTONOMI DAERAH
 - 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
 - 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
 - 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
 - 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
 - 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
 - 100.2 PEMERINTAHAN UMUM
 - 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
 - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan , serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
 - 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
 - 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah
 - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
 - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
 - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
 - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah
- 100.3 HUKUM
 - 100.3.1 Program Legislasi
 - 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
 - 100.3.1.2 Program Legislasi
 - 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
 - 100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
 - 100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur
 - 100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati
 - 100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota
 - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
 - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
 - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
 - 100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
 - 100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
 - 100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
 - 100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
 - 100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
 - 100.3.5 Surat Perintah
 - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
 - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
 - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
 - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
 - 100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
 - 100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
 - 100.3.7.1 Dalam Negeri
 - 100.3.7.2 Luar Negeri
 - 100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
 - 100.3.9 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
 - 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)

- 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
 - 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
 - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
 - 100.3.11.4 Peburuhan
 - 100.3.11.5 Arbitrase
 - 100.3.11.6 Sengketa Adat
- 100.3.12 Perijinan
- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 100.3.13.1 Hak Cipta
 - 100.3.13.2 Hak Paten
 - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
 - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
 - 100.3.13.5 Hak Merk
- 100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 200.1.4.6 Fasilitasi
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
 - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
 - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
 - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi

	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6		Ketahanan Ekonomi
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2		PEMILU
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5	Pencalonan Pemilu
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
	200.2.6	Kampanye Pemilu
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye /pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye

- 200.2.7 Dana Kampanye
 - 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
 - 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
 - 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye
- 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
 - 200.2.8.2 Master surat suara
 - 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
 - 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
 - 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
- 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
- 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
 - 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
 - 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
- 200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

- 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
 - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
 - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
 - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
 - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
 - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
 - 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)

- 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi BEACON
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
 - 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
 - 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
 - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
 - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan Komoditas unggulan
 - 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi

- 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
- 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
- 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
- 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
- 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
 - 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
 - 400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
 - 400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
 - 400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
 - 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
 - 400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
 - 400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
 - 400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
 - 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
 - 400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
 - 400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
 - 400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
 - 400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
 - 400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 - 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
 - 400.2.2.1 Data gender
 - 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
 - 400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 - 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
 - 400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
 - 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
 - 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
 - 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
 - 400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
 - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

- 400.2.4.2 Data perlindungan anak
- 400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
- 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
- 400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
- 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
 - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
 - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
 - 400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
 - 400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
 - 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
 - 400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
- 400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
- 400.3 PENDIDIKAN
 - 400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
 - 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
 - 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
 - 400.3.2.3 Peringatan Hari anak
 - 400.3.2.4 Block Grant
 - 400.3.3 Pendidikan Masyarakat
 - 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
 - 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
 - 400.3.3.3 Pembinaan Program
 - 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
 - 400.3.3.5 Pameran
 - 400.3.3.6 Rakor
 - 400.3.3.7 Sosialisasi
 - 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
 - 400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
 - 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
 - 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
 - 400.3.5.2 Block Grant
 - 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
 - 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
 - 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
 - 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
 - 400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
 - 400.3.6.1 Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
 - 400.3.6.2 Block Grant
 - 400.3.6.3 Lomba, festival
 - 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
 - 400.3.6.5 Pendataan
 - 400.3.6.6 Kelembagaan
 - 400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
 - 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
 - 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
 - 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
 - 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
 - 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru
 - 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
 - 400.3.7.7 Block Grant

- 400.3.8 Sekolah Menengah Atas
 - 400.3.8.1 Kurikulum
 - 400.3.8.2 Bahan Ajar
 - 400.3.8.3 Pelatihan
 - 400.3.8.4 Block grant
 - 400.3.8.5 Bimbingan teknis/sosialisasi
 - 400.3.8.6 Lomba, Sayembara, festival
 - 400.3.8.7 Bantuan operasional Sekolah (BOS)
 - 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin
- 400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
 - 400.3.9.1 Bahan ajar
 - 400.3.9.2 Petunjuk Teknis
 - 400.3.9.3 Block grant
 - 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek
 - 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival
 - 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran
 - 400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran
 - 400.3.9.8 Pendataan
 - 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
- 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
 - 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
 - 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
 - 400.3.10.3 Setifikasi Guru
 - 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
 - 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
 - 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
 - 400.3.10.7 Block grant
 - 400.3.10.8 Bimbingan teknis/sosialisasi
- 400.3.11 Penilaian Pendidikan
 - 400.3.11.1 Penilaian Akademik
 - 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
 - 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
 - 400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
 - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
 - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi
- 400.4 KEOLAHRAGAAN
 - 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
 - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
 - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
 - 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
 - 400.4.3.1 Olahraga Massal
 - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
 - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
 - 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
 - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
 - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi

- 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
- 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
- 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
 - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
 - 400.4.5.2 Layanan Khusus
- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
 - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
 - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
 - 400.4.7.2 Kompetisi
 - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
 - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
 - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
 - 400.4.9.1 Industri Olahraga
 - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
 - 400.4.10.1 Daerah
 - 400.4.10.2 Nasional
 - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
 - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
 - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
- 400.5 KEPEMUDAAN
 - 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
 - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
 - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
 - 400.5.2.3 Pengembangan
 - 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
 - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
 - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
 - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
 - 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
 - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
 - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
 - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
 - 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
 - 400.5.5.1 Pengkajian
 - 400.5.5.2 Pendayagunaan (fasilitasi)
 - 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
 - 400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
 - 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian pendampingan
 - 400.5.7 Kewirausahaan
 - 400.5.7.1 Kelembagaan
 - 400.5.7.2 Pengaderan
 - 400.5.7.3 Perintisan
 - 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
 - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya

- 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi
Kemahasiswaan: Kelembagaan dan
Sumberdaya
- 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran:
Kelembagaan dan Sumberdaya
- 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan:
Kelembagaan, Program dan
Sumberdaya
- 400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
 - 400.5.9.1 Standardisasi
 - 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda
- 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 400.5.10.1 Kemitraan
 - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

- 400.6 KEBUDAYAAN
 - 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
 - 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
 - 400.6.2.2 Pelindungan
 - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
 - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
 - 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 - 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
 - 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
 - 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi
film
 - 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
 - 400.6.4.1 Sejarah
 - 400.6.4.2 Pemetaan nilai
 - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
 - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
 - 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
 - 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
 - 400.6.5.2 Kekayaan budaya
 - 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
 - 400.6.5.4 Diplomasi budaya

- 400.7 KESEHATAN
 - 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
 - 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
 - 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
 - 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan
kesehatan primer
 - 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
 - 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di
puskesmas
 - 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah
sakit
 - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
 - 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
 - 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
 - 400.7.2.9 Pembiayaan darah
 - 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
 - 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah
rumah sakit dan jejaring pelayanan
darah
 - 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah
terpencil, sangat terpencil dan
kepulauan

- 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
- 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
- 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
 - 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
 - 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
 - 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
 - 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
 - 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan
 - 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
 - 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
 - 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
 - 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
- 400.7.4 Keperawatan dan keteknisian medik
 - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
 - 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
 - 400.7.4.3 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
 - 400.7.4.4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
 - 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
- 400.7.5 Penunjang medik dan sarana kesehatan
 - 400.7.5.1 Mikrobiologi dan imunologi
 - 400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
 - 400.7.5.3 Radiologi
 - 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
 - 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
 - 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
- 400.7.6 Kesehatan Jiwa
 - 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
 - 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
 - 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
 - 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
 - 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
 - 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
- 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
 - 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
 - 400.7.7.2 Imunisasi
 - 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
 - 400.7.7.4 Kesehatan matra
- 400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
 - 400.7.8.1 Pengendalian tuberkulosis
 - 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
 - 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

- 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
- 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
- 400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang
 - 400.7.9.1 Pengendalian malaria
 - 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
 - 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
 - 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
- 400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
 - 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
 - 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
 - 400.7.10.3 Penyakit kanker
 - 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
 - 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
- 400.7.11 Penyehatan lingkungan
 - 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
 - 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
 - 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
 - 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
 - 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
- 400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
- 400.7.13 Gizi
 - 400.7.13.1 Gizi makro
 - 400.7.13.2 Gizi mikro
 - 400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik
 - 400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan
 - 400.7.13.5 Kewaspadaan gizi
- 400.7.14 Kesehatan ibu
 - 400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil
 - 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
 - 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
 - 400.7.14.4 Keluarga berencana
 - 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
- 400.7.15 Kesehatan anak
 - 400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi
 - 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
 - 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
 - 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
 - 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
- 400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
 - 400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan
 - 400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan
 - 400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer
 - 400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan
- 400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga
 - 400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja
 - 400.7.17.2 Kapasitas kerja
 - 400.7.17.3 Lingkungan kerja
 - 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja
 - 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
 - 400.7.17.6 Kesehatan olahraga
- 400.7.18 Obat Publik dan perbekalan kesehatan
 - 400.7.18.1 Harga obat publik
 - 400.7.18.2 Pengadaan obat
 - 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
- 400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan
 - 400.7.19.1 Alat kesehatan

	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah Inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari Kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Pro Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen

- 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
- 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
 - 400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
 - 400.7.30.2 Standarisasi produk pangan
 - 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
 - 400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
 - 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
- 400.7.31 Rekam Medis
- 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
 - 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.8.2 Fasilitasi
 - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
 - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
 - 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
 - 400.8.2.4 Kasus Keagamaan
 - 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
 - 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
 - 400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
 - 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
 - 400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
 - 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
 - 400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
- 400.9 SOSIAL
 - 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
 - 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
 - 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
 - 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
 - 400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan Kecatatan
 - 400.9.2.5 Kesejahteraan social anak yang membutuhkan perlindungan khusus
 - 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
 - 400.9.3.1 Rehabilitasi social orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental.
 - 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
 - 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
 - 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
 - 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
 - 400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan
 - 400.9.4.3 Warga binaan Lembaga pasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
 - 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
 - 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

- 400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia
 - 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti
 - 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
 - 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
- 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
 - 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
 - 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
 - 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
- 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi
 - 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi social
 - 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial
 - 400.9.10.4 Kerjasama
- 400.9.11 Jaminan Sosial
 - 400.9.11.1 Seleksi dan vریفikasi
 - 400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
 - 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
 - 400.9.11.4 Kerjasama
- 400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
 - 400.9.12.1 Ketahanan keluarga
 - 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
 - 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
 - 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
 - 400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
- 400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil
 - 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan
 - 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
 - 400.9.13.3 Penggalan dan pengembangan potensi
 - 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
 - 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
- 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
 - 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis
 - 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
 - 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
 - 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
 - 400.9.14.5 Bantuan Langsung
 - 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan

- 400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
 - 400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
 - 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
 - 400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
 - 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 - 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
 - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
 - 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Pedesaan
 - 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
 - 400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - 400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
 - 400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
 - 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
 - 400.10.6.5 Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
 - 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
 - 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
 - 400.11.2.2 Taman Kota
 - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

- 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
 - 400.11.3.2 Pemakaman
 - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
 - 400.11.4 Jalur Hijau
 - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
 - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
 - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
 - 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
 - 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
 - 400.11.7 Pengelolaan Data
 - 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan
- 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
 - 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
- 400.13 KELUARGA BERENCANA
- 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
 - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
 - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
 - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
 - 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
 - 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
 - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
 - 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 - 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 - 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
 - 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
 - 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
 - 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media
 - 400.14.4 Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping koran
 - 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
 - 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
 - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
 - 400.14.5.5 Forum Kehumasan
 - 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
 - 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
 - 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
 - 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
 - 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
 - 400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival, pembuatan spanduk dan iklan
 - 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
 - 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf
- 500 PEREKONOMIAN
 - 500.1 KETAHANAN PANGAN
 - 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
 - 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan

- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

- 500.2 PERDAGANGAN
 - 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
 - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
 - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
 - 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
 - 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
 - 500.2.2.14 Informasi Pasar
 - 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
 - 500.2.2.16 Barang Strategis
 - 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
 - 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar
 - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
 - 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar
 - 500.2.3.4 Tata usaha
 - 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi
 - 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
 - 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
 - 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan
 - 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri
 - 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan
 - 500.2.3.11 Jasa
 - 500.2.3.12 Kerjasama
 - 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama
 - 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian
 - 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
 - 500.2.3.16 Pengawasan

- 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
- 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP
- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 500.2.4.1 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
 - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
 - 500.2.4.4 Pengkajian pasar
 - 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
 - 500.2.4.6 Sistem informasi
 - 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
 - 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang
 - 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang
- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi
- 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 - 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - 300.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 300.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
 - 300.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
 - 300.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas Produksi
 - 500.3.3 Produksi
 - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
 - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
 - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
 - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
 - 500.3.4 Pembiayaan
 - 500.3.4.1 Program Pendanaan
 - 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - 500.3.4.3 Urusan Permodalan
 - 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
 - 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
 - 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
 - 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
 - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
 - 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
 - 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
 - 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
 - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
 - 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.5 Advokasi
 - 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 - 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
 - 500.3.7.2 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
 - 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
 - 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

- 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
 - 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
 - 500.3.8.2 Penelitian Sumber Daya
 - 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
- 500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
- 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
 - 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
- 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

- 500.4 KEHUTANAN
 - 500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.4.2 Penyuluhan
 - 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
 - 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
 - 500.4.2.3 Program Penyuluhan
 - 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
 - 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
 - 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
 - 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
 - 500.4.2.8 Deseminasi
 - 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan
 - 500.4.3 Planologi Kehutanan
 - 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
 - 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
 - 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
 - 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
 - 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
 - 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
 - 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.13 Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
 - 500.4.3.14 Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
 - 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
 - 500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
 - 500.4.4.1 Data areal HPH /HTI/IUPHHK
 - 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK
 - 500.4.4.3 Kerjasama
 - 500.4.4.4 Pembatalan/Penolakan
 - 500.4.4.5 Perpanjangan
 - 500.4.4.6 Modal dan Peralatan
 - 500.4.4.7 Investasi Industri
 - 500.4.4.8 Peralatan
 - 500.4.4.9 Tenaga Kerja
 - 500.4.4.10 Pemegang Saham
 - 500.4.4.11 Neraca Perusahaan
 - 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
 - 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)

- 500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
- 500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
- 500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
- 500.4.4.17 Produksi Kayu
- 500.4.4.18 Produksi non kayu
- 500.4.4.19 Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.20 Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.21 Industri Non Kayu
- 500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
- 500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
- 500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
- 500.4.4.25 Pemblokiran
- 500.4.4.26 Denda
- 500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
- 500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
- 500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
- 500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
- 500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
- 500.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
- 500.4.4.34 Produksi Hutan Alam
- 500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
- 500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri
- 500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
- 500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman /Rencana Kerja Usaha Produksi
- 500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
- 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman
- 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
- 500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
- 500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.46 Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
- 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
- 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
- 500.4.5 Standardisasi dan Lingkungan
 - 500.4.5.1 Standardisasi
 - 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
 - 500.4.5.3 Pengembangan
 - 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
 - 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
 - 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
 - 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
 - 500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
 - 500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan

- 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
- 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
- 500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
 - 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang Dilindungi
 - 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang Tidak dilindungi
 - 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
 - 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
 - 500.4.6.5 Kawasan Konservasi
 - 500.4.6.6 Pengamanan Hutan
 - 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
 - 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
 - 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
 - 500.4.6.11 Bina Cinta Alam
 - 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
 - 500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
- 500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
 - 500.4.7.1 Pengelolaan Benih
 - 500.4.7.2 Kebun Benih
 - 500.4.7.3 Tegakan Benih
 - 500.4.7.4 Pengadaan Benih
 - 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
 - 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
 - 500.4.7.7 Pembibitan
 - 500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
 - 500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
 - 500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
 - 500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
 - 500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - 500.4.7.14 Perhutanan Sosial
 - 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan
- 500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
 - 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
 - 500.4.8.3 Diseminasi
 - 500.4.8.4 Gelar Teknologi
 - 500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - 500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.5.2 Perikanan Tangkap
 - 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
 - 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
 - 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
 - 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
 - 500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
 - 500.5.2.6 Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
 - 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan

- 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
- 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
- 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
- 500.5.2.12 Kelembgaan Usaha Penangkapan
- 500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
- 500.5.2.14 Kenelayanan
- 500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
- 500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
- 500.5.3 Perikanan Budidaya
 - 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
 - 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
 - 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
 - 500.5.3.4 Perbenihan Skala Kecil
 - 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenuhan
 - 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
 - 500.5.3.7 Budidaya Ikan Hias
 - 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
 - 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
 - 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
 - 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
 - 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
 - 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
 - 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
 - 500.5.3.15 Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
 - 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budaya
- 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
 - 500.5.4.2 Pengembangan Produk
 - 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 500.5.4.4 Industri Pengolahan
 - 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
 - 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
 - 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
 - 500.5.4.8 Pengembangan Industri
 - 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
 - 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
 - 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
 - 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
 - 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
 - 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
 - 500.5.4.18 Pengembangan Impor
 - 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
 - 500.5.4.20 Pelayanan Usaha
 - 500.5.4.21 Kemitraan Usaha
 - 500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran

	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5		Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6		Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya NonHayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan

	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7		Karantina Ikan
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6		PERTANIAN
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.6.2	Perlindungan hortikultura
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida

- 500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
 - 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- 500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
 - 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
 - 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
 - 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.9.4 Kelembagaan Benih
- 500.6.10 Budidaya Serealia
 - 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
 - 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
 - 500.6.10.3 Jagung
 - 500.6.10.4 Serealia Lain
- 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.11.1 Kedelai
 - 500.6.11.2 Ubi Kayu
 - 500.6.11.3 Aneka Kacang
 - 500.6.11.4 Aneka Umbi
- 500.6.12 Tanaman Pangan
 - 500.6.12.1 Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
 - 500.6.12.3 Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
- 500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
 - 500.6.13.1 Padi
 - 500.6.13.2 Jagung dan Serealia lain
 - 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
 - 500.6.13.4 Aneka Umbi
- 500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
 - 500.6.14.1 Tanaman Pangan
 - 500.6.14.2 Holtikultura
 - 500.6.14.3 Perkebunan
 - 500.6.14.4 Peternakan
- 500.6.15 Mutu dan Standarisasi
 - 500.6.15.1 Standardisasi
 - 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
 - 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
 - 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
- 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
 - 500.6.16.2 Investasi
 - 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
 - 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
 - 500.6.17.1 Informasi Pasar
 - 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
 - 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
 - 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
- 500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat

- 500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
 - 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
 - 500.6.20 Diseminasi
 - 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
 - 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
 - 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
 - 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
 - 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
 - 500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
 - 500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - 500.6.26.1 Hak Cipta
 - 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
 - 500.6.26.3 Hak Paten Biasa
 - 500.6.26.4 Hak Merek
 - 500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
 - 500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
 - 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
 - 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
 - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
 - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
 - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
 - 500.6.28 Pelayanan Hukum
 - 500.6.28.1 Sertifikasi
 - 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
 - 500.6.29 Karantina Pertanian
 - 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
 - 500.6.29.2 Karantina Hewan
 - 500.6.30 Bimbingan Teknis
 - 500.6.31 Evaluasi
- 500.7 PETERNAKAN
- 500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
 - 500.7.2.2 Pakan Ternak
 - 500.7.2.3 Budidaya Ternak
 - 500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

- 500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran
- 500.7.3 Bimbingan Teknis
- 500.7.4 Evaluasi
- 500.8 PERKEBUNAN
 - 500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.8.2 Tanaman Semusim
 - 500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
 - 500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
 - 500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
 - 500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
 - 500.8.4 Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
 - 500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
 - 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
 - 500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
 - 500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
 - 500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
 - 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
 - 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
 - 500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan
 - 500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
 - 500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
 - 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
 - 500.8.8 Evaluasi Perkebunan
- 500.9 PERINDUSTRIAN
 - 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
 - 500.9.2.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.2.2 Industri Agro
 - 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.3 Promosi Industri
 - 500.9.3.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
 - 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
 - 500.9.4.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.4.2 Industri Agro
 - 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
 - 500.9.5.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.5.2 Industri Agro
 - 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.6 Industri Hijau
 - 500.9.6.1 Industri Manufaktur
 - 500.9.6.2 Industri Agro
 - 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
 - 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah
- 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
- 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
- 500.9.12 Standarisasi
 - 500.9.12.1 Standar
 - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
 - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi
- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
 - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
 - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.2.3 Pertambangan
 - 500.10.2.4 Panas Bumi
 - 500.10.2.5 Geosains
 - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
 - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
- 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
 - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.3.9 Survei Geologi
- 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
 - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.4.4 Survei Geologi
 - 500.10.4.5 Konservasi
- 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
 - 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
 - 500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur /Gas serta kebakaran Batubara
 - 500.10.5.4 Survei Geologi
- 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
 - 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi
 - 500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah
 - 500.10.6.4 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
 - 500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 - 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
 - 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)

- 500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
- 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
- 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
- 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS
- 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas
- 500.10.7.7 Partisipasi Interest
- 500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan
- 500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha Izin / rekomendasi / penandasahan), Pengawasan
 - 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
 - 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- 500.10.9 Teknik dan Lingkungan
 - 500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
 - 500.10.9.2 Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
 - 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
 - 500.10.9.4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las

- 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
- 500.10.9.6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
- 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
- 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.9.10 Usaha penunjang
- 500.10.10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.10.4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
 - 500.10.11.1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
 - 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
 - 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
 - 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
 - 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi
 - 500.10.11.7 Road Map di Bidang EBT
- 500.10.12 Panas Bumi
 - 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
 - 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
 - 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
 - 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak

- 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
- 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair
- 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
- 500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
- 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
- 500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
- 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi
- 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
- 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
- 500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
- 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
- 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
- 500.10.13 Bioenergi
 - 500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
 - 500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BNN)
 - 500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor-Import
 - 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BNN (HIP BNN)
 - 500.10.13.5 Evaluasi/Revisi HIP BNN
 - 500.10.13.6 Database Pengusahaan Bioenergi
 - 500.10.13.7 Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
 - 500.10.13.8 Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
 - 500.10.13.9 Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.14 Aneka Energi
 - 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
 - 500.10.14.2 Penetapan Kapasitas Usaha
 - 500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - 500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
 - 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.15 Konservasi Energi
 - 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
 - 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
 - 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
 - 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast

- 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan /teknologi efisiensi
- 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
- 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
- 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
- 500.10.15.9 Investment Grade Audit (IGA)
- 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
 - 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastuktur Bidang EBTKE
 - 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
- 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
 - 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant /hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
 - 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antaralain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
 - 500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan
- 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
 - 500.10.18.1 Penyiapan Usaha ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
 - 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik
 - 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik
 - 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
- 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
 - 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
 - 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan

- 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
- 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansin (CDM)
- 500.10.20 Sertifikasi
 - 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
 - 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LKS)
 - 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instansi Tenaga Listrik
 - 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
 - 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi
- 500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
- 500.10.22 Standarisasi Kompetensi
- 500.10.23 Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
 - 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
 - 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenalistrikan
 - 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenalistrikan
 - 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenalistrikan
- 500.10.24 Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
 - 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang Ketenagalistrikan
 - 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang Ketenagalistrikan
 - 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
 - 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
 - 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
- 500.10.25 Bina Program
 - 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batubara
 - 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara

- 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
- 500.10.25.7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
- 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
- 500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
- 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral
 - 500.10.26.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 - 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
 - 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
 - 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
 - 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
 - 500.10.26.12 Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
 - 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
 - 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
 - 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
- 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara
 - 500.10.27.1 Ketenagakerjaan
 - 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
 - 500.10.27.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
 - 500.10.27.5 Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
 - 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
 - 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

- 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
- 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
- 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.12 Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
- 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
- 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara
- 500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
- 500.10.28 Penerimaan Negara
 - 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan PNBPNBP
- 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
 - 500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
 - 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi
 - 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala /Wakil Kepala Teknik Tambang
 - 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang /Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
 - 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
 - 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia
 - 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
 - 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi

- 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
- 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
- 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
- 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
- 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
- 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
- 500.10.29.17 Pengawasan Teknis
- 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
- 500.10.29.19 Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
- 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.3 Dokumen penerapan / pemanfaatan / pendayagunaan / replikasi/prototipe hasil penelitian / pengkajian / pengembangan / inovasi
 - 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.6 Pembinaan penelitian / Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
 - 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
 - 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
- 500.10.31 Sarana Litbang
 - 500.10.31.1 Administrasi penggunaan peralatan
 - 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi

- 500.10.32 Afiliasi
 - 500.10.32.1 Proyek Percontohan
 - 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
 - 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.32.4 Penyajian Informasi
- 500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian
 - 500.10.33.1 Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
 - 500.10.33.2 Energi Kelautan dan Wilayah Penelitian Energi dan wilayah pantai
 - 500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
 - 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
- 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi
 - 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi
 - 500.10.34.3 Laboratorium
 - 500.10.34.4 Study
 - 500.10.34.5 Teknologi Proses
 - 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk
 - 500.10.34.7 Teknologi Gas
- 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara
 - 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
 - 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
 - 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara
- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
 - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
 - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
 - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
 - 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
- 500.11 PERHUBUNGAN
 - 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
 - 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan

- 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
- 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan.
 - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
 - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
 - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
 - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
 - 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
 - 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
 - 500.11.8.7 Angkutan perintis
 - 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
 - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
 - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
 - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
 - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
- 500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
 - 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
- 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
 - 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.15.2 Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
- 500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
 - 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
 - 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
 - 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
 - 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
- 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan

- 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
- 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
 - 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
 - 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

- 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
- 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan
- 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan
 - 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
 - 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
 - 500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.28 Pengembangan Keselamatan
 - 500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
 - 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
- 500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
 - 500.11.29.1 Promosi keselamatan: penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
 - 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
 - 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
- 500.11.31 Audit Keselamatan
 - 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
 - 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.32 Inspeksi Keselamatan
 - 500.11.32.1 Pedoman keselamatan
 - 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
- 500.11.33 Parkir
 - 500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
 - 500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
 - 500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.12.2 Telekomunikasi
 - 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
 - 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
 - 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
 - 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
 - 500.12.3 Penyiaran
 - 500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi

	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4		Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5		Pengendalian Informatika
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6		e-Government :
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7		e- Business
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8		Pemberdayaan Informatika Masyarakat
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9		Pemberdayaan Industri Informatika
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10		Keamanan Informasi
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11		Komunikasi Publik
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13		Pengelolaan Media Publik
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual

- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
 - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi
- 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
 - 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
 - 500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
 - 500.13.2.3 Industri Pariwisata
 - 500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
 - 500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
 - 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
 - 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
 - 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
 - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
 - 500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
 - 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
 - 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
 - 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
 - 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
 - 500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
 - 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
 - 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitas
 - 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan kepariwisataan
 - 500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 500.14 STATISTIK
 - 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
 - 500.14.2.1 Perencanaan
 - 500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
 - 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
 - 500.14.2.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan /pengiriman, pengelompokkan /Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing / Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
 - 500.14.2.5 Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
 - 500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus
 - 500.14.3 Survei
 - 500.14.3.1 Perencanaan
 - 500.14.3.2 Persiapan
 - 500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
 - 500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan / Batching), Pemeriksaandokumen dan pengkodean(Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
 - 500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
 - 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei
 - 500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
 - 500.14.4.1 Kompilasi Data
 - 500.14.4.2 Analisis data
 - 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi
 - 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
- 500.15 KETENAGAKERJAAN
- 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

- 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
 - 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
 - 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
- 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi
 - 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
 - 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
 - 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
- 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
 - 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
 - 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
 - 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
 - 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
- 500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
 - 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
 - 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
 - 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
 - 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.6 Bina Pemagangan
 - 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
 - 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
 - 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
 - 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan
- 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
 - 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
 - 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
 - 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan
- 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
 - 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
 - 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
 - 500.15.8.3 Bursa Kerja
 - 500.15.8.4 Analisis Jabatan
- 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - 500.15.9.1 Antar Kerja
 - 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
 - 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
 - 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja
- 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
 - 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
 - 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
 - 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
 - 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga

- 500.15.11 Standardisasi Profesi
 - 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
 - 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi
- 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
 - 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
 - 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
 - 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
 - 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
- 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
 - 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
 - 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
 - 500.15.13.3 Pemasarakatan Hubungan Industrial
- 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.14.1 Pengupahan
 - 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
- 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
 - 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
 - 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
 - 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
- 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
 - 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
 - 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
 - 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
 - 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
 - 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
 - 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
 - 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
 - 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
 - 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
 - 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum

- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
 - 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
 - 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
 - 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
- 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.1 Program, Analisis dan standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan kompetensi K3
 - 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
 - 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
- 500.16 PENANAMAN MODAL
 - 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
 - 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
 - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
 - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
 - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
 - 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
 - 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional

- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas
- 500.17 PERTANAHAN
 - 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
 - 500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
 - 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
 - 500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
 - 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
 - 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
 - 500.17.4 Sengketa Tanah
 - 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
 - 500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian
- 500.18 TRANSMIGRASI
 - 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
 - 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
 - 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
 - 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
 - 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
 - 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
 - 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
 - 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
 - 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
 - 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
 - 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
 - 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
 - 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
 - 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
 - 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
 - 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
 - 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
 - 500.18.5.4 Pelayanan Investasi

- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
 - 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
 - 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
 - 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
 - 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
 - 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
 - 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
 - 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
 - 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi
 - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
 - 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
 - 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

- 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
- 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
- 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

- 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
- 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
 - 600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
- 600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)
 - 600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
 - 600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
 - 600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
 - 600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
- 600.1.8 Pembangunan Jalan
 - 600.1.8.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.8.2 Manajemen Konstruksi
 - 600.1.8.3 Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage
 - 600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
- 600.1.9 Preservasi Jalan
 - 600.1.9.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.9.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi
 - 600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan
- 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
 - 600.1.10.1 Standar dan Pedoman
 - 600.1.10.2 Perencanaan Teknis
 - 600.1.10.3 Teknik Jembatan
 - 600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
- 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
 - 600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah
 - 600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
 - 600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
- 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
 - 600.1.12.1 Persiapan perusahaan jalan tol
 - 600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol

- 600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.12.4 Pengambilalihan hak
pengusahaan jalan tol
- 600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
 - 600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan
dan Kemitraan
 - 600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan
dan Pelaksanaan
- 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 600.1.14.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan
 - 600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan
 - 600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus
 - 600.1.14.5 Kelembagaan
- 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
 - 600.1.15.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung
 - 600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara
 - 600.1.15.4 Penataan Bangunan dan
Lingkungan Khusus
 - 600.1.15.5 Kelembagaan
- 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum
 - 600.1.16.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air
Minum Perkotaan
 - 600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air
Minum Pedesaan
 - 600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum
Khusus
 - 600.1.16.5 Kelembagaan
 - 600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum
 - 600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan
Bengkel Kerja
- 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman
 - 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
 - 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
 - 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
 - 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan
Permukiman Khusus
 - 600.1.17.5 Kelembagaan
 - 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan
Bengkel Kerja
- 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi
- 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
 - 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
 - 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa
Pasar Perumahan
 - 600.2.2.3 Kemitraan

- 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
 - 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
 - 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
- 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
 - 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
 - 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
 - 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
 - 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
- 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
 - 600.2.5.2 Analisa Teknik
 - 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
 - 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
- 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
 - 600.2.6.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.6.2 Penyediaan
 - 600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
 - 600.2.6.4 Pengelolaan
- 600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
 - 600.2.7.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
 - 600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervise
 - 600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
 - 600.2.7.5 Perencanaan Teknik
 - 600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
 - 600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan
- 600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
 - 600.2.8.1 Perencanaan Teknik
 - 600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum
 - 600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang
 - 600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
- 600.2.9 Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
 - 600.2.9.4 Pasar Infrastruktur
- 600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan
 - 600.2.10.2 Kontrak Konstruksi
 - 600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan
 - 600.2.10.4 Manajemen Mutu

- 600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
 - 600.2.11.1 Kelembagaan
 - 600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi
 - 600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
 - 600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi
 - 600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
 - 600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi
 - 600.2.12.2 Penerapan Kompetensi
 - 600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
 - 600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas
 - 600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama
 - 600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
 - 600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
 - 600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu
 - 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
 - 600.2.15.2 Pengembangan Materi
 - 600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
 - 600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
 - 600.2.16.1 Antar Sektor
 - 600.2.16.2 Antar Wilayah
 - 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
 - 600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
 - 600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis
 - 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
 - 600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolita
 - 600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
 - 600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
 - 600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
 - 600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
 - 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi
- 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
- 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah

- 600.3.2 Perencanaan
 - 600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
 - 600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - 600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
 - 600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
 - 600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
 - 600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
 - 600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
- 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
 - 600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
 - 600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
- 600.3.4 Pemetaan
 - 600.3.4.1 Peta Dasar
 - 600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
 - 600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
 - 600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara
- 600.4 LINGKUNGAN HIDUP
 - 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
 - 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
 - 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
 - 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan
 - 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
 - 600.4.5 Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan
 - 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
 - 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
 - 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa
 - 600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak
 - 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
 - 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana, dan Jasa
 - 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
 - 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
 - 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak

- 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
 - 600.4.8.1 Pengembangan
 - 600.4.8.2 Pemanfaatan
 - 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik
 - 600.4.8.4 Keamanan Hayati
 - 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan
- 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
 - 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem
 - 600.4.9.2 Rawa
- 600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
 - 600.4.10.1 Perangkat mitigasi
 - 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
 - 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon
 - 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
- 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
 - 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
 - 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim
- 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi
 - 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
 - 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut
- 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
 - 600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan
 - 600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan
 - 600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping
 - 600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
- 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
 - 600.4.14.1 Pemantauan
 - 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemeliharaan Kontaminasi
- 600.4.15 Pengelolaan Sampah
 - 600.4.15.1 Pembatasan sampah
 - 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
 - 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura
 - 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura
- 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
 - 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
 - 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan
- 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - 600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
 - 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan

- 600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan
 - 600.4.18.1 Penyidikan
 - 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
 - 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS
- 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
 - 600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi
 - 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye
- 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
 - 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan
 - 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan
- 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
 - 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan
 - 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan
- 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
 - 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat
 - 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha
- 600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan
 - 600.4.23.1 Pengelolaan Data
 - 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi
 - 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak
 - 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
- 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
 - 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana
 - 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
- 600.4.25 Standarisasi dan teknologi
 - 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
 - 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
 - 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
- 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
 - 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
 - 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
 - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
 - 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
 - 700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
 - 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

- 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
- 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
- 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
- 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
- 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
- 700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
- 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
- 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

- 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
 - 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
 - 800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan Antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
- 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 800.1.2.1 Formasi ASN Antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
 - 800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
 - 800.1.2.3 Pengumuman Kelulusan ASN
 - 800.1.2.4 Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
 - 800.1.2.5 Pengangkatan ASN

- 800.1.2.6 Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
- 800.1.2.7 Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
- 800.1.2.8 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
- 800.1.3 Mutasi Pegawai
 - 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan / Pertimbangan Kepala BKN
 - 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat / Golongan /Jabatan
 - 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural / Fungsional
 - 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar /Status /Kedudukan Hukum Pegawai
 - 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja
 - 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
- 800.1.4 Pengembangan Karir
 - 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/Diklat / Kursus/ Magang /Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
 - 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah
 - 800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier
 - 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
 - 800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
- 800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara
 - 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
 - 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
 - 800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
- 800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.6.1 Kode Etik Pegawai
 - 800.1.6.2 Disiplin
 - 800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat
 - 800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
 - 800.1.6.5 Pemberhentian Sementara

- 800.4.6.6 Pensiun ASN antara lain :
Administrasi Pensiun ASN,
Penetapan Pensiun ASN Penetapan
Pertimbangan Teknis Pensiun ASN,
Pensiun Pejabat Negara dan Janda/
Dudanya
- 800.1.7 Bantuan Hukum
- 800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai
 - 800.1.8.1 Status Kepegawaian
 - 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian
 - 800.1.8.3 Keberatan Pegawai
 - 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
- 800.1.9 Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.1 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
 - 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
- 800.1.10 Pengawasan dan pengendalian
 - 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
 - 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
 - 800.1.10.3 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
 - 800.1.10.4 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
 - 800.1.10.5 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
 - 800.1.10.6 Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
- 800.1.11 Administrasi Pegawai
 - 800.1.11.1 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
 - 800.1.11.2 Cuti Sakit
 - 800.1.11.3 Cuti Bersalin
 - 800.1.11.4 Cuti Tahunan
 - 800.1.11.5 Cuti Alasan Penting
 - 800.1.11.6 Cuti Besar
 - 800.1.11.7 Cuti Di luar Tanggungan Negara
 - 800.1.11.8 Karpeg/KPE/Karis/Karsu
 - 800.1.11.9 Keanggotaan Organisasi Profesi / Kedinasan
 - 800.1.11.10 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
 - 800.1.11.11 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
 - 800.1.11.12 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
 - 800.1.11.13 Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
- 800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
 - 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
 - 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
 - 800.1.12.3 Tabungan Perumahan

- 800.1.12.4 Bantuan Sosial
- 800.1.12.5 Pakaian Dinas
- 800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
- 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
- 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
- 800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
- 800.1.12.10 Rekam Medis
- 800.1.13 Administrasi Perseorangan
 - 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - 800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
 - 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
 - 800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
 - 800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi
- 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 - 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
 - 800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
 - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
 - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
 - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
 - 800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
 - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
 - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
 - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
 - 800.2.3 Widyaiswara
 - 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
 - 800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
 - 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
 - 800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
 - 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
 - 800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
 - 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.2 Penyelenggaraan Diklat
 - 800.2.4.3 Konsultasi, Advokasi, asisten penyelenggaraan diklat
 - 800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran

		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN		
	900.1	KEUANGAN DAERAH	
	900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)	
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
		900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
		900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
	900.1.2	Penyusunan Anggaran	
		900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan
		900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
		900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
		900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
	900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
		900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
		900.1.3.2	Pendapatan
		900.1.3.3	Belanja
		900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
		900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
		900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
		900.1.3.7	Daftar Gaji
		900.1.3.8	Kartu Gaji
		900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
		900.1.3.10	Laporan Keuangan
	900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
		900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
		900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

- 900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
- 900.1.4.4 Dokumen Loan Agreement (PHLN) Antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
- 900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
- 900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
- 900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
- 900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l.: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
- 900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA).
- 900.1.4.10 Staff Appraisal Report
- 900.1.4.11 Report /Laporan
- 900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah
- 900.1.4.13 Completion Report/Annual Report
- 900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- 900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
- 900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - 900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi
 - 900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
 - 900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan /Semesteran
- 900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
 - 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
 - 900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan /Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan

- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO)Pemilu termasuk Perubahan / Pergeseran/Revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
 - 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
 - 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
 - 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
 - 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
 - 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
 - 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain: fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
 - 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah Antara lain: fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
 - 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah Antara lain: analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan

- 900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
- 900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
- 900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - 900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
 - 900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

- 900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain: Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
- 900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN
					AKTIF	INAKTIF	
I	000	UMUM					
1		000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
			000.1.1	Telekomunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri			
				000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri			
				000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.6	Penyediaan Konsumsi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas			
				000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor				
				000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				000.1.8.2	Penghijauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.1.8.3	Perbaikan Gedung	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman	1 tahun	1 tahun	Musnah
			000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer				
				000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.1.9.2	Pemasangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
			000.1.10	Ketertiban dan Keamanan				
				000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
			000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir		1 Tahun	1 tahun	Musnah
			000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya		1 Tahun	1 tahun	Musnah
2		000.2	PERLENGKAPAN					
			000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan				
				000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	2 tahun setelah pemutakhiran data	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
			000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor				
			000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor	2 tahun setelah pemutakhiran data	3 tahun	Musnah	
			000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			000.2.3	Distribusi				
			000.2.3.1	Barang habis pakai	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			000.2.3.2	Barang milik daerah	2 tahun setelah proses kegiatan di pertanggungjawabkan	3 tahun	Musnah	
			000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)	3 tahun setelah proses kegiatan di pertanggungjawabkan	7 tahun	Musnah	
			000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen	
3		000.3	PENGADAAN					
			000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN
					AKTIF	INAKTIF	
				kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)			
			000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)	2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)	2 tahun setelah pemutakhiran data	3 tahun	Permanen
			000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)	2 tahun	3 tahun	Permanen
4		000.4	PERPUSTAKAAN				
			000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			000.4.2	Deposit Bahan Pustaka			
			000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog	2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.4.3	Koleksi Pustaka				
				000.4.3.1	Pembelian	3 tahun	7 tahun	Musnah
				000.4.3.2	Hibah	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.4.3.3	Hadiah	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.4.3.4	Tukar Menukar	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.4.3.6	Terbitan Internal	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka		2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
			000.4.6	Layanan Perpustakaan				
				000.4.6.1	Keanggotaan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.4.6.2	Peminjaman	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.4.6.3	Peminjaman	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
			000.4.7	Kerjasama Perpustakaan				
			000.4.7.1	MoU		2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
			000.4.7.2	Perjanjian kerjasama		2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
			000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional		2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
			000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
			000.4.8.1	Pengembangan situs web		1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	1 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 tahun	Musnah
				000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
				000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
			000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan		2 tahun setelah data di perbarui	3 tahun	Permanen
			000.4.10	Konservasi				
				000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)				
			000.4.12	Transformasi Digital				
			000.4.13	Kurasi Digital				
			000.4.14	Pengembangan Perpustakaan				
				000.4.14.1	Perpustakaan Umum	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.4.14.2	Perpustakaan Khusus	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
5		000.5	KEARSIPAN					
			000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			000.5.2	Pembinaan Kearsipan				
			000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)		1 tahun	1 tahun	Permanen
			000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis		1 tahun	1 tahun	Musnah
			000.5.2.3	Penilaian Arsiparis		1 tahun	1 tahun	Musnah
			000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)		2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.5.2.5	Data Base Arsiparis		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
			000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)	3 tahun	7 tahun	Musnah
				000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)	2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis				
				000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)	1 tahun	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)	1 tahun	1 tahun	Permanen
			000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)		2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai	3 tahun	Permanen
			000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)		2 tahun tahun setelah hak dan kewajiban selesai	3 tahun	Permanen
			000.5.6	Penyusutan Arsip				
				000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di	1 tahun	1 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)			
				000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)	1 tahun	1 tahun	Permanen
			000.5.7	Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)		2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.5.8	Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis				
				000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	1 tahun setelah data di perbarui (update)	1 tahun	Permanen
				000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	1 tahun setelah data di perbarui (update)	1 tahun	Permanen
			000.5.9	Pengelolaan Arsip Statis				
				000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis,	1 tahun	1 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)			
				000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.9.7	Preservasi Kuratif	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			000.5.10	Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.5.15	Pengawasan Kearsipan				
				000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.5.15.3	Sanksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
6		000.6	PERSANDIAN					
			000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			000.6.2	Pengamanan persandian				
				000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi				
				000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.6.3.3	Pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.6.3.4	Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian				
				000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.6.4.2	Jaring Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik				
				000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing	1 tahun	1 tahun	Musnah
				000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	1 tahun	1 tahun	Permanen
				000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.6.5.7	Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Permanen
7		000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
			000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang				
				000.7.1.1	Musrenbang Provinsi	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.1.2	Musrenbang Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				000.7.1.6	Musrenbang Desa	3 tahun	7 Tahun	Musnah
			000.7.2	Perencanaan Pembangunan Daerah				
				000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang	2 tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				000.7.2.6	Program kerja tahunan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				000.7.2.8	Laporan Berkala	1 tahun	1 Tahun	Musnah
				000.7.2.9	Laporan Insidental	1 tahun	1 Tahun	Permanen
				000.7.2.10	Evaluasi Program	1 tahun	1 Tahun	Permanen
			000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		2 tahun	3 Tahun	Permanen
			000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan		2 tahun	3 Tahun	Musnah
			000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		1 tahun	1 Tahun	Permanen
			000.7.6	Aksi Strategis Daerah				
				000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.6.5	Penerapan perencana aksi strategi daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
			000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.7.2	Pendanaan Daerah	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara	3 tahun	7 Tahun	Permanen
				000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	3 tahun	7 Tahun	Permanen
8		000.8	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA					
			000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
				000.8.1.1	Pembentukan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.8.1.2	Pengubahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.8.1.3	Pembubaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja				
				000.8.2.1	Analisa Jabatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.8.2.2	Analisa Beban Kerja			
			000.8.3	Ketatalaksanaan				
				000.8.3.1	Proses Bisnis	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.8.3.2	Standar Pelayanan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur	2 tahun	3 tahun	Permanen
				000.8.3.4	Pelayanan Publik	2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional		2 tahun	3 tahun	Permanen
			000.8.5	Evaluasi Kelembagaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi				
				000.8.6.1	Budaya Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
				000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah	
9	000.9	PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN							
			000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi					
				000.9.6.1	Data	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				000.9.6.2	Statistik	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		2 tahun	3 tahun	Permanen	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop		2 tahun	3 tahun	Musnah
II	100	PEMERINTAHAN						
1		100.1	OTONOMI DAERAH					
			100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)		2 Tahun	3 Tahun	
			100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
				100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				100.1.4.5	Assosiasi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2		100.2	PEMERINTAHAN UMUM					
			100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama				
				100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
				100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	5 tahun	5 Tahun	Permanen
				100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
				100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	5 tahun	5 Tahun	Permanen
				100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
3		100.3	HUKUM					
			100.3.1	Program Legislasi				
				100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.1.2	Program Legislasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)		2 tahun setelah diundangkan	3 tahun	Permanen
			100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah				
				100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten	2 tahun	3 tahun	Musnah
				100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			100.3.4	Instruksi/Surat Edaran				
				100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
				100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	2 tahun	3 tahun	Musnah
			100.3.5	Surat Perintah				
				100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur	2 tahun	3 tahun	Musnah
				100.3.5.2	Surat Perintah Bupati	2 tahun	3 tahun	Musnah
				100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	2 tahun	3 tahun	Musnah
				100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	2 tahun	3 tahun	Musnah
			100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis		2 tahun	3 tahun	Permanen
			100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama				
				100.3.7.1	Dalam Negeri	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan	3 tahun	Permanen
				100.3.7.2	Luar Negeri	2 tahun setelah kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah dilaksanakan	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)		Sampai dengan tidak berlaku	1 Tahun	Simpan di perpustakaan
			100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)		2 Tahun setelah diperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
			100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum				
				100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
				100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
				100.3.11.3	Tata Usaha Negara	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				100.3.11.4	Perburuhan	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
				100.3.11.5	Arbitrase	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
				100.3.11.6	Sengketa Adat	2 tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 Tahun	Musnah
			100.3.12	Perijinan		2 tahun setelah ijin diperbarui	3 tahun	Permanen
			100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
				100.3.13.1	Hak Cipta	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
				100.3.13.2	Hak Paten	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
				100.3.13.3	Hak Desain Industri	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen
				100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
			100.3.13.5	Hak Merk		2 tahun setelah HAKI habis	3 tahun	Permanen	
			100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak		1 tahun Setelah ditolak permohonan	1 tahun	Musnah	
III	200	POLITIK							
1		200.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
			200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
			200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan					
				200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.2.3	Bela Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
			200.1.3	Kewaspadaan Nasional					
				200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 tahun	3 Tahun	Permanen	
				200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan				
				200.1.4.1	Ketahanan Seni	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.2	Ketahanan Budaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.6	Fasilitasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				200.1.4.11	Fasilitasi Ormas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			200.1.5	Politik Dalam Negeri				
				200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	2 tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.6	Pemerintah Daerah	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.7	Database Parpol	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.5.9	Pemilihan Umum	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			200.1.6	Ketahanan Ekonomi				
				200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
2		200.2	PEMILU					
			200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
			200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih				
				200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu				
				200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu				
				200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			200.2.5	Pencalonan Pemilu				
				200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.5.3	Daftar bakal calon	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	2 tahun	3 tahun	Permanen
			200.2.6	Kampanye Pemilu				
				200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
				200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
			200.2.7	Dana Kampanye				
				200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye	2 tahun	3 tahun	Permanen
			200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara				
				200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.8.2	Master surat suara	2 tahun	3 tahun	Permanen
				200.2.8.3	Surat suara yang terpakai	Sejak pemungutan suara s.d Pengucapan Sumpah/Janji	1 Bulan setelah Pengucapan Sumpah/Janji	Musnah
				200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Sejak pemungutan suara s.d	1 Bulan setelah	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
2		300.2	PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN					
			300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
				300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah (kecuali laporan)
				300.2.2.6	Registrasi BEACON	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			300.2.3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			300.2.4	Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			300.2.5	Bina Ketenagaan dan Permasyarakatan				
				300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			300.2.6	Operasi Pencarian dan Pertolongan		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			300.2.7	Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			300.2.8	Operasi Komunikasi					
				300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah	
				300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	2 tahun	3 tahun	Musnah	
				300.2.8.3	Registrasi BEACON	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			300.2.9	Inventarisasi dan Pemeliharaan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			300.2.10	Pengembangan Sistem Informasi		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			300.2.11	Penyajian dan Layanan Informasi		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			300.2.12	Pelaporan dan Evaluasi					
				300.2.12.1	Laporan Harian	2 tahun	3 tahun	Musnah	
				300.2.12.2	Laporan Bulanan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
				300.2.12.3	Laporoan Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				300.2.12.4	Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	
V	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1		400.1	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL						

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun Sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			400.1.2	Pembangunan Sumber Daya				
			400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.3	Peningkatan Infrastruktur				
			400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				
				400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya				
				400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.5.5	Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	7 tahun	Musnah
			400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus				
				400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	3 tahun	7 tahun	Musnah
				400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	3 tahun	7 tahun	Musnah
				400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan	3 tahun	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	3 tahun	7 tahun	Musnah	
				400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	3 tahun	7 tahun	Musnah	
				400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	3 tahun	7 tahun	Musnah	
				400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi	3 tahun	7 tahun	Musnah	
2	400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
			400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum					
			400.2.2.1	Data gender		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen	
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)					
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan		2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan	3 tahun	Permanen	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)				
				400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
				400.2.4.2	Data perlindungan anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
				400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)				
				400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah
				400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen
				400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak		2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak		2 tahun	3 tahun	Permanen
3		400.3	PENDIDIKAN					
			400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal				
				400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.2.2	Pelatihan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.2.3	Peringatan Hari anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.2.4	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.3.3	Pendidikan Masyarakat				
				400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.3.3	Pembinaan Program	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.3.5	Pameran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.3.6	Rakor	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.3.3.7	Sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik		2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama				
				400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.5.2	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus				
				400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.6.2	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.6.3	Lomba, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.6.5	Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.6.6	Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
				400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.7.3	Sertifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.3.7.7	Block Grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.3.8	Sekolah Menengah Atas				
				400.3.8.1	Kurikulum	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.8.2	Bahan Ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.8.3	Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.8.4	Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.8.8	Bantuan siswa miskin	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus				
				400.3.9.1	Bahan ajar	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.2	Petunjuk Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.3	Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.8	Pendataan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik				
				400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.10.3	Setifikasi Guru	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.3.10.7	Block grant	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.3.11	Penilaian Pendidikan				
				400.3.11.1	Penilaian Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.11.2	Penilaian Non Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan				
				400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan				
				400.3.13.1	Prasarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				400.3.13.2	Sarana Pendidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
4		400.4	KEOLAHRAGAAN					
			400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan				
				400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	1 tahun	1 tahun	Musnah
			400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi				
				400.4.3.1	Olahraga Massal	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.3.2	Olahraga Tradisional	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	1 tahun	1 tahun	Musnah
			400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga				
				400.4.4.1	Olahraga Pendidikan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.4.2	Olahraga Rekreasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.4.3	Olahraga Prestasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
				400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga	1 tahun	1 tahun	Musnah
			400.4.5	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus				
				400.4.5.1	Olahraga Tradisional	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.5.2	Layanan Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.4.6	Kemitraan dan Penghargaan Olahraga				
				400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
						pihak telah ditunaikan		
				400.4.6.2	Penghargaan Olahraga	2 tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 tahun	Permanen
			400.4.7	Pembibitan dan IPTEK Olahraga				
				400.4.7.1	Pembibitan Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.7.2	Kompetisi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.7.3	IPTEK Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.4.8	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan				
				400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.4.9	Industri dan Promosi Olahraga				
				400.4.9.1	Industri Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.9.2	Promosi Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.4.10	Olahraga Prestasi				
				400.4.10.1	Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.10.2	Nasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.10.3	Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.4.11	Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				
				400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
5	400.5	KEPEMUDAAN							
		400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
		400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda						
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)		2 tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 tahun	Permanen	
			400.5.2.3	Pengembangan		2 tahun	3 tahun	Permanen	
		400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda						
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum		2 tahun	3 tahun	Musnah	
		400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda						
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK		2 tahun	3 tahun	Musnah	
		400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)						
			400.5.5.1	Pengkajian		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.5.5.2	Pengembangan		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)		2 tahun	3 tahun	Musnah	
		400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda						

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
6		400.6	KEBUDAYAAN					
			400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman				
				400.6.2.1	Registrasi Nasional	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
				400.6.2.2	Pelindungan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
				400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
				400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi	1 Tahun setelah data diperbarui	1 Tahun	Permanen
			400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman				
				400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
				400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
				400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
				400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya				
				400.6.4.1	Sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.4.2	Pemetaan nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				
				400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.5.2	Kekayaan budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.6.5.4	Diplomasi budaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7		400.7	KESEHATAN					
			400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar				
				400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.9	Pembiayaan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.10	Penggunaan darah rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.13	Akreditasi puskesmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.2.14	Puskesmas berprestasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan				
				400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan				
				400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.5.2	Patologi dan toksilogi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.5.3	Radiologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.7.6	Kesehatan Jiwa				
				400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				
				400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.7.2	Imunisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.7.4	Kesehatan matra	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung				
				400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang				
				400.7.9.1	Pengendalian malaria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.9.3	Pengendalian zoonosis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular				
				400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.10.3	Penyakit kanker	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.11	Penyehatan lingkungan				
				400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.11.4	Higien sanitasi pangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan				
			400.7.13	Gizi				
				400.7.13.1	Gizi makro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.13.2	Gizi mikro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.13.3	Gizi klinik dan diabetik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.13.5	Kewaspadaan gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.14	Kesehatan ibu				
				400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.7.14.4	Keluarga berencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.15	Kesehatan anak				
				400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer				
				400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga				
				400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.17.2	Kapasitas kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.17.3	Lingkungan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.17.6	Kesehatan olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan				
				400.7.18.1	Harga obat publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.18.2	Pengadaan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN
					AKTIF	INAKTIF	
			400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan				
			400.7.19.1	Alat kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.20	Kefarmasian				
			400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.20.2	Farmasi klinis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.20.3	Farmasi Komunitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian				
			400.7.21.1	Obat tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan				
			400.7.22.1	Surat keterangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan				
			400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan				
				400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.25	Intelegensia Kesehatan				
				400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.26	Kesehatan Haji				
				400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.7.27	Promosi Kesehatan				
				400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	400.7.27.1
				400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	2 Tahun	3 Tahun	400.7.27.2
				400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	400.7.27.3

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				400.7.27.4	Hari kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	400.7.27.4	
			400.7.28	Data dan Informasi					
				400.7.28.1	Statistik kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen					
				400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.29.4	Obat Asli Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya					
				400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.30.2	Standardisasi produk pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			400.7.31	Rekam Medis		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
8		400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN						

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			400.8.2	Fasilitasi				
				400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.2.4	Kasus Keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
				400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
			400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME				
				400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
9		400.9	SOSIAL					
			400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak				
				400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.9.3	Rehabilitasi Sosial				
				400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				
				400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA		2 tahun	3 Tahun	Musnah
			400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia				
				400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti	2 tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial		3 tahun	7 Tahun	Musnah
			400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
				400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
				400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.10.4	Kerjasama	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.9.11	Jaminan Sosial				
				400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi	3 tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				400.9.11.4	Kerjasama	3 tahun	7 Tahun	Musnah
			400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial				
				400.9.12.1	Ketahanan keluarga	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil				
				400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan				
				400.9.14.1	Identifikasi dan analisis	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				400.9.14.2	Pengembangan kapasitas	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh	3 tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				400.9.14.5	Bantuan Langsung	3 tahun	7 Tahun	Musnah
				400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan	3 tahun	7 Tahun	Musnah
			400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial				
				400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
10		400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
			400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan				
				400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.10.3.1	Lembaga Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Permanen
			400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
				400.10.4.1	Budaya Nusantara	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat				
				400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal	2 tahun	3 tahun	Musnah
			400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan				
				400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				400.10.6.4	Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
				400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)		2 tahun	3 tahun	Musnah	
11		400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN						
			400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			400.11.2	Pertamanan					
				400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				400.11.2.2	Taman Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			400.11.3	Pemakaman					
				400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				400.11.3.2	Pemakaman	3 tahun	7 tahun	Permanen	
				400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			400.11.4	Jalur Hijau					
				400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			400.11.5	Peran Serta Masyarakat		2 tahun	3 tahun	Musnah	
			400.11.6	Pengawasan dan Penindakan		2 tahun	3 tahun	Permanen	
			400.11.7	Pengelolaan Data		2 tahun setelah data diperbarui	3 tahun	Musnah	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.11.8	Evaluasi dan Pelaporan	2 tahun setelah diperbarui	3 tahun	Musnah	
12	400.12	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
			400.12.1	Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
			400.12.2	Pendaftaran Penduduk				
				400.12.2.1	Identitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.2.2	Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.2.3	Pindah Datang Penduduk Antar Negara	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.2.4	Pendataan Penduduk Rentan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.2.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.12.3	Pencatatan Sipil				
				400.12.3.1	Kelahiran dan Kematian	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.3.2	Perkawinan dan Perceraian	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.3.3	Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.3.4	Pencatatan Kewarganegaraan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.12.4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
				400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			400.12.5	Pengembangan Kebijakan Kependudukan				
				400.12.5.1	Kuantitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.5.2	Kualitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.5.3	Mobilitas Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 Tahun	Permanen
			400.12.6	Penyerasian Kependudukan				
				400.12.6.1	Indikator Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.6.2	Proyeksi Penduduk	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	2 tahun	3 Tahun	Permanen
13		400.13	KELUARGA BERENCANA					

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.13.1	Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			400.13.2	Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
			400.13.2.1	Pengumpulan dan pengolahan data		1 Tahun	1 Tahun	Dinilai Kembali
			400.13.2.2	Evaluasi dan pelaporan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.3	Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
			400.13.3.1	Penyiapan fasilitas		1 Tahun	1 Tahun	Dinilai kembali
			400.13.3.2	Evaluasi dan pelaporan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.4	Profil dan proyeksi penduduk				
			400.13.4.1	Data profil dan proyeksi penduduk		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.4.2	Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.5	Penetapan parameter pengendalian penduduk				
			400.13.5.1	Penetapan sasaran parameter		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.5.2	Evaluasi sasaran parameter		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.6	Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk				
			400.13.6.1	Pemanfaatan profil dan proyeksi		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			400.13.6.2	Pemanfaatan parameter		1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			400.13.7	Pengembangan Sistem				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.13.7.1	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
				400.13.7.2	Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
			400.13.8	Pengembangan Materi				
				400.13.8.1	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
				400.13.8.2	Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
			400.13.9	Monitoring dan Evaluasi				
				400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
				400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.10	Analisis Sosial		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.11	Analisis Ekonomi		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Permanen
			400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah				
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta				
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta		2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta		2 Tahun setelah standar diperbarui	3 Tahun	Permanen
			400.13.20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan				
			400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria				
				400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak				
				400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak				
				400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja				
				400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.13.28.2	Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja				
				400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
				400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.31	Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
				400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
				400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.34	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga		2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
			400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
				400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
				400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
				400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
				400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			400.13.41	Advokasi dan pencitraan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
				400.13.42.1	Promosi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				400.13.42.3	Produk media komunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
				400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah				
				400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.46	Tenaga Lini Lapangan				
				400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan				
				400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan				
				400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan				
				400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			400.13.51	Analisis dan evaluasi				
				400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data				
				400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.52.2	Pengelolaan bank data	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			400.13.53	Infrastruktur teknologi informasi				
				400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN		
					AKTIF	INAKTIF			
			400.13.54	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi					
				400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
14		400.14	HUBUNGAN MASYARAKAT						
			400.14.1	Keprotokolan					
				400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	1 Tahun	1 Tahun	Permanen	
			400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat		Selama berlaku	-	Musnah	
			400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media		1 tahun	1 Tahun	Permanen	
			400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan					
				400.14.4.1	Kliping koran	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
			400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah					
				400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN		
						AKTIF	INAKTIF			
				400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
				400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
				400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
				400.14.5.5	Forum Kehumasan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
				400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
			400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD		1 Tahun	1 Tahun	Permanen		
			400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten		1 Tahun	1 Tahun	Permanen		
			400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal		1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
			400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik		1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
			400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan		1 Tahun	1 Tahun	Musnah		
			400.14.11	Penghargaan/tanda kenang-kenangan		1 Tahun	1 Tahun	Permanen		
			400.14.12	Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf		1 Tahun	1 Tahun	Permanen		
VI	500	PEREKONOMIAN								
1		500.1	KETAHANAN PANGAN							
			500.1.1	Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen		
			500.1.2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan						

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.1.2.1	Ketersediaan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.2.2	Akses Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.2.3	Kerawanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.1.3	Distribusi dan Cadangan Pangan				
				500.1.3.1	Distribusi Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.3.2	Harga Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.3.3	Cadangan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.1.4	Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
				500.1.4.1	Konsumsi Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.4.2	Penganekaragaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.4.3	Keamanan Pangan Segar	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.1.5	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
				500.1.5.1	Dewan Ketahanan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.1.5.2	Penghargaan Ketahan Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.1.6	Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.1.7	Bimbingan Teknis		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.1.8	Evaluasi		2 tahun	3 tahun	Musnah
2		500.2	PERDAGANGAN					
			500.2.1	Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			500.2.2	Perdagangan Dalam Negeri				
				500.2.2.1	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.2	Bisa Usaha Jasa Perdagangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.2.2.3	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
				500.2.2.4	Informasi Perusahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.5	Pelaku Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.14	Informasi Pasar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.16	Barang Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
				500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
				500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	8 Tahun	Permanen
				500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.2.3.4	Tata usaha	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.2.3.11	Jasa	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
				500.2.3.12	Kerjasama	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 Tahun	Musnah
				500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Permanen
				500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
				500.2.3.16	Pengawasan	2 Tahun setelah diperbarui	3 Tahun	Permanen
				500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi				
				500.2.4.1	Pengkajian pasar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.4	Pengkajian pasar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.5	Pengembangan Pasar	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.6	Sistem informasi	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
				500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
			500.2.5	Bimbingan Teknis		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
			500.2.6	Evaluasi		2 Tahun setelah kerja sama berakhir	3 tahun	Musnah
3		500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					
			500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		3 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	7 Tahun	Permanen
			500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun .	3 Tahun	Permanen
				500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
				500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
				500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
			500.3.3	Produksi				
				500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.3.4	Pembiayaan				
				500.3.4.1	Program Pendanaan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.3.4.3	Urusan Permodalan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha				
				500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.5.2	Ekspor dan Impor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
				500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
				500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.3.6.5	Advokasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
				500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK				
				500.3.8.1	Penelitian Koperasi	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
				500.3.8.2	Penelitian UKM	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
				500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen
				500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK	2 Tahun setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga		2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak ditunaikan	3 Tahun	Permanen
			500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)				
				500.3.10.1		Peraturan Perundang-Undangan	2 Tahun	3 Tahun
				500.3.10.2		Sarana dan Prasarana	2 Tahun	3 Tahun
			500.3.11	Monitoring dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4		500.4	KEHUTANAN					
			500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.4.2	Penyuluhan				
				500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.2	Materi Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.3	Program Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.4	Sarana Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.2.8	Deseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.4.3	Planologi Kehutanan				
				500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.10	Jaringan Data Spasial	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
			500.4.4	Bina Usaha Kehutanan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.3	Kerjasama	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.5	Perpanjangan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.6	Modal dan Peralatan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.7	Investasi Industri	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.8	Peralatan	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.4.9	Tenaga Kerja	3 tahun	2 tahun	Musnah
				500.4.4.10	Pemegang Saham	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.4.11	Neraca Perusahaan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.4.17	Produksi Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.4.18	Produksi non kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.4.21	Industri Non Kayu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp	3 tahun	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi	3 tahun	2 tahun	Musnah
				500.4.4.25	Pemblokiran	3 tahun	2 tahun	Musnah
				500.4.4.26	Denda	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.34	Produksi Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan				
				500.4.5.1	Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.5.3	Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
				500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.6.5	Kawasan Konservasi	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.6.6	Pengamanan Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.6.11	Bina Cinta Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial				
				500.4.7.1	Pengelolaan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.2	Kebun Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.3	Tegakan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.4	Pengadaan Benih	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.4.7.7	Pembibitan	3 tahun	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.7.12	Tanaman Reboisasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.7.14	Perhutanan Sosial	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.7.15	Pengendalian Perladangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				
				500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.8.3	Diseminasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.8.4	Gelar Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5		500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			500.5.2	Perikanan Tangkap				
				500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap	2 Tahun setelah data diperbarui (update)	3 Tahun	Permanen
				500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.5	Pengawasan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.14	Kenelayan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			500.5.3	Perikanan Budidaya				
				500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil	2 tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.3.6	Budidaya Air Tawar	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya	2 tahun	3 Tahun	Permanen
				500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
				500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.2	Pengembangan Produk	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.4	Industri Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.8	Pengembangan Industri	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
				500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
				500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Permanen
				500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.17	Pengembangan Ekspor	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.4.18	Pengembangan Impor	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.4.20	Pelayanan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.4.21	Kemitraan Usaha	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.4.23	Investasi dan Permodalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.4.24	Informasi dan Promosi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil				
				500.5.5.1		Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	2 tahun	3 tahun

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				500.5.5.2		Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.3		Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.4		Informasi dan Evaluasi Spasial	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.5		Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.6		Konservasi Wawasan	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.7		Konservasi Jenis Ikan	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.8		Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.9		Mitigasi Bencana Lingkungan	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.10		Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.11		Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.12		Rehabilitasi dan Reklamasi	2 tahun	3 tahun

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.5.5.13		Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.14		Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.15		Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.16		Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.17		Akses Permodalan	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.18		Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.19		Sosial Budaya Masyarakat	2 tahun	3 tahun
				500.5.5.20		Pengembangan Usaha	2 tahun	3 tahun
			500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				
				500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.6.13	Sistem Pemantauan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.6.17	Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal	3 tahun	7 tahun	Permanen
				500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.5.7	Karantina Ikan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.2	Penahanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.3	Pengasingan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.4	Pengamatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.5	Pengakuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.6	Penolakan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.7	Pemusnahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.7.10	Permohonan Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.11	Pemasukan Formulir	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.14	Surat Perintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.15	Rekomendasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.16	Penutupan Suatu Area	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional	3 tahun	7 tahun	Musnah
				500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.5.7.21	Lokasi Karantina	2 tahun	3 tahun	Musnah
6		500.6	PERTANIAN					
			500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.6.2	Perlindungan hortikultura				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.6.3	Perbenihan Hortikultura				
				500.6.3.1	Penilaian Varietas	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
				500.6.4.1	Basis Data Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.4.2	Pengendalian Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi				
				500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.5.4	Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.6.6	Pembiayaan Pertanian				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.6.6.1	Pembiayaan Program	2 tahun setelah data diperbarui/ update	3 tahun	Permanen
				500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.6.7	Pupuk Pestisida				
				500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.7.2	Pupuk Anorganik	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.7.3	Pestisida	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian				
				500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan				
				500.6.9.1		Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	2 tahun	3 tahun
				500.6.9.2		Produksi Benih Serealia	2 tahun	3 tahun
				500.6.9.3		Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	2 tahun	3 tahun

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				500.6.9.4		Kelembagaan Benih	2 tahun	3 tahun
			500.6.10	Budidaya Serealia				
				500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.10.3	Jagung	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.10.4	Serealia Lain	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
				500.6.11.1	Kedelai	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.11.2	Ubi Kayu	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.11.3	Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.11.4	Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.12	Tanaman Pangan				
				500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Penggangu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan				
				500.6.13.1	Padi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.13.4	Aneka Umbi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian				
				500.6.14.1	Tanaman Pangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.14.2	Hortikultura	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.6.14.3	Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.14.4	Peternakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.15	Mutu dan Standarasi				
				500.6.15.1	Standardisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi				
				500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.16.2	Investasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.16.4	Promosi Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.17	Pemasaran Domestik				
				500.6.17.1	Informasi Pasar	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.6.17.4	Jaringan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
				500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.20	Diseminasi		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian				
				500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		1 tahun	1 tahun	Musnah
			500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan		1 tahun	1 tahun	Musnah
			500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan		2 tahun setelah data dipebarui/ update	8 tahun	Permanen
			500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan		1 tahun	1 tahun	Permanen
			500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
				500.6.26.1	Hak Cipta	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
				500.6.26.2	Hak Paten Sederhana	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
				500.6.26.3	Hak Paten Biasa	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen
				500.6.26.4	Hak Merek	2 tahun setelah perijinan masa berlakunya habis	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN
					AKTIF	INAKTIF	
7		500.7	PETERNAKAN				
			500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.7.2.2	Pakan Ternak	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.7.2.3	Budidaya Ternak	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)				
			500.7.3	Bimbingn Teknis	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			500.7.4	Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah	
8		500.8	PERKEBUNAN					
			500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			500.8.2	Tanaman Semusim				
				500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar				
				500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.8.4	Tanaman Tahunan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.8.5	Perlindungan Perkebunan				
				500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha				
				500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
			500.8.8	Evaluasi Perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah	
9		500.9	PERINDUSTRIAN					
			500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama				
				500.9.2.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.9.2.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			500.9.3	Promosi Industri				
				500.9.3.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.9.3.2	Promosi Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			500.9.4	Standarisasi dan Teknologi				
				500.9.4.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.4.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.9.5.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.5.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.9.6	Industri Hijau				
				500.9.6.1	Industri Manufaktur	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.6.2	Industri Agro	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.9.12	Standarisasi				
				500.9.12.1	Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.12.2	Penyiapan Penerapan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.12.3	Infrastruktur Standar	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri				
				500.9.13.1	Kebijakan Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN		
					AKTIF	INAKTIF			
			500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup					
				500.9.14.1	Industri Hijau	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
				500.9.14.2	Lingkungan Hidup	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
				500.9.14.3	Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
			500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual					
				500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
				500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
				500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
			500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri		3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
10		500.10	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
			500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			500.10.2	Rekomendasi Kegeologian					
				500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				500.10.2.3	Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				500.10.2.4	Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				500.10.2.5	Geosains	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.3	Penelitian Kegeologian				
				500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.3.6	Sumber Daya Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.3.9	Survei Geologi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian				
				500.10.4.1	Sumber Daya Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.4.4	Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.4.5	Konservasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi				
				500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.5.4	Survei Geologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi				
				500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
				500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				
				500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas	5 Tahun	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
					untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)			
				500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan	5 Tahun	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)			
				500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS	2 Tahun setelah masa perpanjangan kontrak selesai	10 Tahun kecuali c 30 Tahun	Permanen
				500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	2 Tahun setelah Penetapan Harga Gas yang baru	5 Tahun	Musnah
				500.10.7.7	Partisipasi Interest	2 Tahun setelah Penetapan Harga Gas yang baru	5 Tahun	Permanen
				500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan	2 Tahun setelah disetujui	5 Tahun	Permanen
			500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi				
				500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	2 Tahun	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	2 Tahun	5 Tahun, kecuali Laporan Bulanan beserta Analisa Pergerakan Harga Bahan Bakar 3 Tahun, Formula harga dan Subsidi Bahan Bakar, SK Penetapan Harga, 10 Tahun	Musnah, kecuali Laporan penyusunan APBN/P subsidi bahan bakar dan SK Penetapan Harga, permanen
			500.10.9	Teknik dan Lingkungan				
				500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
				500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
				500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
				500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil	2 Tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)			
				500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)	2 Tahun	3 tahun	Musnah
				500.10.9.10	Usaha penunjang	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
			500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
				500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi				
				500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.12	Panas Bumi				
				500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	3 Tahun setelah lelang WKP selesai	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			500.10.13	Bioenergi				
				500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.10.14	Aneka Energi				
				500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.10.15	Konservasi Energi				
				500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE				
				500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik				
				500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan,	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
					Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)				
				500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
			500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan					
				500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)	2 Tahun	5 Tahun	Musnah	
				500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik	3 Tahun	7 Tahun	Permanen	
				500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan					
				500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.10.20	Sertifikasi				
				500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Permanen
				500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	2 Tahun Setelah Habis Masa Berlakunya	3 Tahun	Permanen
				500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi	2 Tahun setelah masa berlaku	3 Tahun	Permanen
			500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan		2 Tahun setelah masa berlaku	3 Tahun	Permanen
			500.10.22	Standarisasi Kompetensi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
				500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
				500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen
				500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	2 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
				500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
				500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan	2 Tahun setelah habis masa berlaku	3 Tahun	Musnah
			500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara				
				500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	3 Tahun setelah diperbarui	7 Tahun	Permanen
				500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.26.1	Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
				500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
				500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)	2 Tahun setelah diperpanjang	3 Tahun	Permanen
				500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.26.12	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					rancangan awal sampul dengan rancangan akhir			
				500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Sepanjang tidak ada sengketa	5 Tahun	Permanen
			500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara				
				500.10.27.1	Ketenagakerjaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara	2 Tahun	10 Tahun, kecuali b, 5 Tahun	Permanen, kecuali b dan c, musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Sepanjang masih diperlukan	10 Tahun	Permanen
				500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	3 Tahun setelah diperpanjang	7 Tahun	Permanen
				500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	2 Tahun	10 Tahun, kecuali b, 5 Tahun	Permanen, kecuali b dan c, musnah
				500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.27.12	Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.28	Penerimaan Negara				
				500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
			500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara				
				500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
				500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
				500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
				500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					Pertambahan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)			
				500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.17	Pengawasan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)			
			500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan				
				500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.10.31	Sarana Litbang				
				500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	1 Tahun setelah peralatan dihapus	5 Tahun	Permanen
			500.10.32	Afiliasi				
				500.10.32.1	Proyek Percontohan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.10.32.4	Penyajian Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian				
				500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
				500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
				500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
			500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi				
				500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
				500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi	3 Tahun setelah penelitian berakhir	7 Tahun	Permanen
				500.10.34.3	Laboratorium	2 Tahun setelah penelitian berakhir	3 Tahun	Permanen
				500.10.34.4	Study	2 Tahun Setelah Penelitian Berakhir	3 Tahun	Permanen
				500.10.34.5	Teknologi Proses	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.34.7	Teknologi Gas	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara				
				500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan				
				500.10.36.1	Energi baru terbarukan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.36.2	Teknologi Ketenagalistrikan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.36.3	Lingkungan dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				500.10.36.4	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
11		500.11	PERHUBUNGAN					
			500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan				
				500.11.2.1	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.2	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.3	Penetapan lokasi terminal barang utama	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.4	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.5	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.11.2.6	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.7	Penetapan kelas jalan primer	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.8	Kualifikasi teknis petugas terminal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.2.9	Jaringan transportasi jalan sekunder	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan				
				500.11.3.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.3.2	Pengembangan transportasi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor				
				500.11.4.1	Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.4.2	Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.4.3	Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.4.4	Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor				
				500.11.5.1	Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.5.2	Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.5.3	Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.5.4	Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
				500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.7	Perlengkapan Jalan				
				500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.8	Angkutan Penumpang				
				500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi			
				500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
				500.11.8.7	Angkutan perintis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.9	Angkutan Barang				
				500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.9.2	Tarif angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			500.11.10	Monitoring Operasional				
				500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
				500.11.11.1	Pedoman Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.11.3	Bimtek PPNS	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen
				500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
				500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.15.2	Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.18.1	Manajemen lalu lintas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
				500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.21	Tarif dan Keperintisan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
				500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan				
				500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.24	Angkutan Perkotaan				
				500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi			
			500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan				
				500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan				
				500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
				500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.28	Pengembangan Keselamatan				
				500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan				
				500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan			
			500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum				
				500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.31	Audit Keselamatan				
				500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.32	Inspeksi Keselamatan				
				500.11.32.1	Pedoman keselamatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.11.33	Parkir				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	Berlaku selama masih digunakan	3 Tahun	Musnah
				500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
12		500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
			500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			500.12.2	Telekomunikasi				
				500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.3	Penyiaran				
				500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal				
				500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.5	Pengendalian Informatika				
				500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.6	e- Government				
				500.12.6.1	Tata Kelola e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.12.7	e- Business				
				500.12.7.1	Tata Kelola e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika				
				500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.9.4	Industri Konten Multimedia	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.12.10	Keamanan Informasi				
				500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.12.11	Komunikasi Publik				
				500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi				
				500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.12.12.2	Informasi Perekonomian	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
				500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
			500.12.13	Pengelolaan Media Publik				
				500.12.13.1	Media Cetak	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
				500.12.13.2	Media Online	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
				500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual	2 Tahun setelah data di perbarui (update)	3 Tahun	Musnah
			500.12.14	Kemitraan Komunikasi				
				500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
				500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
				500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak,	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
						kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		
			500.12.15	Infrastruktur Informatika				
				500.12.15.1	Jaringan	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.15.3	Keamanan Informatika	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.16	Sistem dan Data				
				500.12.16.1	Portal dan Konten	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.17	Pusat Kerjasama				
				500.12.17.1	Kerja Sama daerah	2 tahun	3 Tahun	Permamen
				500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral	2 tahun	3 Tahun	Permamen
			500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
				500.12.18.1	Pelayanan Informasi	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.18.2	Hubungan Masyarakat	2 tahun	3 Tahun	Musnah
				500.12.18.3	Bimbingan Teknis	2 tahun	3 Tahun	Musnah
			500.12.19	Evaluasi		2 tahun	3 Tahun	Musnah
13		500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.13.2.3	Industri Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.13.3	Pemasaran Pariwisata				
				500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.3.4	Pencitraan Indonesia	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
				500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK				
				500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.5.2	Desain dan Arsitektur	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 tahun	3 tahun	Permanen
14		500.14	STATISTIK					
			500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
			500.14.2.1	Perencanaan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan		1 tahun	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba			
				500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	1 tahun	1 tahun	Musnah
				500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.14.3	Survei				
				500.14.3.1	Perencanaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.14.3.2	Persiapan	1 tahun	1 Tahun	Permanen
				500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan,	1 tahun	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)			
				500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)	1 tahun	1 Tahun	Musnah
				500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)	1 tahun	1 Tahun	Musnah
				500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.14.4	Konsolidasi Data Statistik				
				500.14.4.1	Kompilasi Data	1 tahun	1 Tahun	Musnah
				500.14.4.2	Analisis data	1 tahun	1 Tahun	Musnah
				500.14.4.3	Penyusunan Publikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		2 tahun	3 tahun	Permanen
15		500.15	KETENAGAKERJAAN					

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun setelah penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja				
			500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
			500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
			500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga		3 tahun setelah kerjasama selesai	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
						dan kewajiban para pihak telah ditunaikan		
			500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
				500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.5.3	Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.6	Bina Pemagangan				
				500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan				
				500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja				
				500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.15.8.3	Bursa Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.8.4	Analisis Jabatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
				500.15.9.1	Antar Kerja	Antar Kerja	2 tahun	3 tahun
				500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Penempatan Tenaga Kerja Khusus	2 tahun	3 tahun
				500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2 tahun	3 tahun
				500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja	Pemberdayaan Pengantar Kerja	2 tahun	3 tahun
			500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
				500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.11	Standardisasi Profesi				
				500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi				
				500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.12.2	Perjanjian Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
				500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
				500.15.14.1	Pengupahan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
				500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
				500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
				500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
				500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.15.20	Bina Penegakan Hukum				
				500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN		
					AKTIF	INAKTIF			
			500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)					
				500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.21.2	Hasil kajian, perencanaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
			500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3					
				500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	2 tahun	3 tahun	Permanen	
16		500.16	PENANAMAN MODAL						

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal				
			500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
			500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah		3 Tahun	7 Tahun	Permanen
			500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.4	Promosi Penanaman Modal				
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri		2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.16.4.4	Promosi Sektoral		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi		2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal				
			500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.16.5.2	Kerja Sama Regional	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
				500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal				
				500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.16.7.2	Pelayanan Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas	2 tahun	3 tahun	Permanen
17		500.17	PERTANAHAN					
			500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan				
				500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah				
				500.17.3.1	Penatagunaan Tanah	2 tahun setelah ijin tidak berlaku	3 tahun	Musnah
				500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik	2 Tahun setelah Data diperbarui	3 tahun	Permanen
				500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.17.4	Sengketa Tanah				
				500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa	2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
				500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian	2 tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
18		500.18	TRANSMIGRASI					
			500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen
			500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi				
				500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah			2 tahun
				500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah			2 tahun
				500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan			2 tahun
				500.18.2.4	Advokasi Pertanahan			2 tahun
			500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.18.3.1	Penyiapan Lahan			2 tahun
				500.18.3.2	Penyiapan Sarana			2 tahun
				500.18.3.3	Penyiapan Prasarana			2 tahun
				500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman			2 tahun
			500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
				500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi			2 tahun
				500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan			2 tahun
				500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan			2 tahun
				500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi			2 tahun
			500.18.5	Partisipasi Masyarakat				
				500.18.5.1	Promosi dan Motivasi			2 tahun
				500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan			2 tahun
				500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah			2 tahun
				500.18.5.4	Pelayanan Investasi			2 tahun
			500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
				500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.18.6.2	Bina Sistem Informasi	2 tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	3 tahun	Permanen
				500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
				500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.18.8	Pengembangan Usaha				
				500.18.8.1	Kewirausahaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.8.2	Produksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
				500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.9.2	Pengembangan Sarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.9.3	Pengembangan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	2 tahun	3 tahun	Permanen
			500.18.10	Penyerasian Lingkungan				
				500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen	
				500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	2 tahun	3 tahun	Permanen	
VII	600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN							
1		600.1	PEKERJAAN UMUM						
			600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air					
			600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.1.2.2	Kelembagaan			1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan			1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air					
			600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.1.3.2	Manajemen Mutu			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman			2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air					
			600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai			2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa			2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
				600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)				
				600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan				
				600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.8	Pembangunan Jalan				
				600.1.8.1	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.8.2	Manajemen Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.9	Preservasi Jalan				
				600.1.9.1	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	
				600.1.9.2	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.10	Pengelolaan Jembatan				
				600.1.10.1	Standar dan Pedoman	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.10.2	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.10.3	Teknik Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah				
				600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.12	Pengaturan Jalan Tol				
				600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
				600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.12.4	Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
			600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman				
				600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman				
				600.1.14.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.14.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan				
				600.1.15.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.15.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
				600.1.16.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.16.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				600.1.17.1	Perencanaan Teknis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.17.5	Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
			600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
2		600.2	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
			600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan		2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.2.3	Kemitraan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan				
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan		2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan				
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.2.5.2	Analisa Teknik		2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.2.6	Penyediaan Rumah Susun				
				600.2.6.1	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.6.2	Penyediaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.6.4	Pengelolaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus				
				600.2.7.1	Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.2.7.5	Perencanaan Teknik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
			600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				
				600.2.8.1	Perencanaan Teknik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.2.9	Investasi Infrastruktur				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.2.9.4	Pasar Infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
				600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.2.10.2	Kontrak Konstruksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.2.10.4	Manajemen Mutu	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
				600.2.11.1	Kelembagaan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
				600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.2.12.2	Penerapan Kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
				600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi				
				600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi				
				600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.15.2	Pengembangan Materi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)				
				600.2.16.1	Antar Sektor	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.16.2	Antar Wilayah	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
			600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis				
				600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan				
				600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi		2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
3		600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)						
			600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah		2 tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 tahun	Permanen	
			600.3.2	Perencanaan					
				600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
				600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
				600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
				600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
				600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
				600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
				600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota	1 Tahun setelah tidak dipergunakan	1 tahun	permanen	
			600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian					

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
				600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
				600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	2 Tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	permanen
			600.3.4	Pemetaan				
				600.3.4.1	Peta Dasar	1 tahun	1 tahun	Permanen
				600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat	1 tahun	1 tahun	Musnah
				600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air	1 tahun	1 tahun	Musnah
				600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara	1 tahun	1 tahun	Musnah
4		600.4	LINGKUNGAN HIDUP					
			600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah				
			600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
				600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
				600.4.3.1	Evaluasi Penerapan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.4.4	Ekonomi Lingkungan		2 tahun	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			600.4.5	Dampak Lingkungan				
				600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	3 tahun	7 tahun	Permanen
				600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
			600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan				
				600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa	3 tahun	7 tahun	Permanen
				600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	3 tahun	7 tahun	Permanen
				600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	3 tahun	7 tahun	Permanen
				600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak	3 tahun	7 tahun	Permanen
			600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan				
				600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan				
				600.4.8.1	Pengembangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.8.2	Pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.8.4	Keamanan Hayati	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				
				600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.9.2	Rawa	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.4.10.1	Perangkat mitigasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 tahun	1 tahun	Musnah
				600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim				
				600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				
				600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi	1 tahun	1 tahun	Permanen
				600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut	1 tahun	1 tahun	Permanen
			600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun				
				600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.4.14.1	Pemantauan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.15	Pengelolaan Sampah				
				600.4.15.1	Pembatasan sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
				600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	1 tahun	1 tahun	Permanen
				600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
				600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura	1 tahun	1 tahun	Permanen
			600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan				
				600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	1 tahun	1 tahun	Musnah
				600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
				600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
				600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	2 tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Permanen
			600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan				
				600.4.18.1	Penyidikan	3 tahun	7 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	3 tahun	7 tahun	Permanen
				600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS	3 tahun	7 tahun	Musnah
			600.4.19	Komunikasi Lingkungan				
				600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat				
				600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.20.2	Kearifan Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat				
				600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan				
				600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat	2 tahun	3 tahun	Musnah
				600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
			600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan				
				600.4.23.1	Pengelolaan Data	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.23.2	Pengelolaan Informasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.24	Kelembagaan Lingkungan				
				600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.25	Standarisasi dan teknologi				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
			600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
				600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian	2 tahun	3 tahun	Permanen
VIII	700	PENGAWASAN						
1		700.1	PENGAWASAN INTERNAL					
			700.1.1	Rencana Pengawasan				
				700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan	3 Tahun	7 Tahun	Permanen
				700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan				
				700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor	2 Tahun setelah tindak lanjut selesai	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
					Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)			
				700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah
				700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
				700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	2 Tahun setelah proses data di update	3 Tahun	Permanen
				700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
				700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
IX	800	KEPEGAWAIAN						
1		800.1	SUMBER DAYA MANUSIA					

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
				800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)	2 Tahun sejak data diperbarui (update)	3 Tahun	Musnah
				800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
				800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)	2 Tahun sejak standar baru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
			800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai				
				800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
						lama dinyatakan tidak berlaku		
				800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
				800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				800.1.2.5	Pengangkatan ASN	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
				800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
			800.1.3	Mutasi Pegawai				
				800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
				800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
				800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
				800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja	1 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	1 Tahun	Musnah
				800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
			800.1.4	Pengembangan Karir				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
				800.1.4.2	Penyesuaian ijazah	1 Tahun sejak data diperbarui (update)	1 Tahun	Musnah
				800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
				800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	1 Tahun sejak berakhirnya masa tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
			800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara				
				800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
				800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Permanen
				800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
			800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
				800.1.6.1	Kode Etik Pegawai	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
				800.1.6.2	Disiplin	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
				800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
				800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.1.6.5	Pemberhentian Sementara	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
				800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
			800.1.7	Bantuan Hukum		2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Musnah
			800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai				
				800.1.8.1	Status Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
				800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
				800.1.8.3	Keberatan Pegawai	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
			800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian				
				800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
				800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	3 Tahun	Musnah
				800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Permanen
				800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	1 Tahun sejak dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			800.1.10	Pengawasan dan pengendalian				
				800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
				800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
			800.1.11	Administrasi Pegawai				
				800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	1 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.2	Cuti Sakit	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.3	Cuti Bersalin	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.4	Cuti Tahunan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
				800.1.11.5	Cuti Alasan Penting	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.6	Cuti Besar	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	1 Tahun setelah sistem atau data diperbarui	1 Tahun	Musnah
				800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
			800.1.12	Kesejahteraan Pegawai				
				800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.3	Tabungan Perumahan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.4	Bantuan Sosial	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.5	Pakaian Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
				800.1.12.10	Rekam Medis	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Musnah
			800.1.13	Administrasi Perseorangan				
				800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
				800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3 Tahun setelah penetapan pensiun	7 Tahun	Musnah
				800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				800.1.13.4	Sekretaris Daerah	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen	
				800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	1 Tahun sejak hak dan kewajiban habis	1 Tahun	Permanen	
			800.1.14	Penilaian Kompetensi					
				800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 tahun	Musnah	
				800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun	3 tahun	Musnah	
2	800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
			800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah		2 Tahun sejak penetapan kebijakan yang terbaru	3 Tahun	Permanen	
			800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan					
				800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Permanen	
				800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	2 Tahun	3 tahun	Permanen	
				800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				800.2.2.4	Modul-modul diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				800.2.2.5	Panduan fasilitator	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	
				800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen	
				800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	1 Tahun	1 Tahun	Musnah	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
				800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	2 Tahun	3 tahun	Permanen
			800.2.3	Widyaiswara				
				800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
				800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 tahun	Musnah
				800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
				800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara	1 Tahun	1 tahun	Musnah
				800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	1 Tahun	1 tahun	Musnah
				800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen
			800.2.4	Penyelenggaraan Diklat				
				800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
				800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah
				800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1 Tahun	1 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN	
						AKTIF	INAKTIF		
				800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	2 Tahun	3 Tahun	Musnah	
				800.2.4.5	Sistem informasi diklat	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan	3 Tahun	Permanen	
				800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
				800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen	
			800.2.5	Alumni		2 tahun setelah data diperbarui	3 Tahun	Permanen	
X	900	KEUANGAN							
1		900.1	KEUANGAN DAERAH						
			900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)					
			900.1.1.1			Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	2 tahun	3 tahun	
			900.1.1.2			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	2 tahun	3 tahun	
			900.1.1.3			Penyampaian Rancangan Anggaran	2 tahun	3 tahun	

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
						Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan		
				900.1.1.4		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	2 tahun	3 tahun
			900.1.2	Penyusunan Anggaran				
				900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
				900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	2 tahun	3 tahun	Permanen
				900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	2 tahun	3 tahun	Permanen
				900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	2 tahun	3 tahun	Permanen
			900.1.3	Pelaksanaan Anggaran				
				900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				900.1.3.2	Pendapatan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.3.3	Belanja	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.3.4	Pembiayaan Daerah	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.3.7	Daftar Gaji	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.3.8	Kartu Gaji	Selama yang bersangkutan masih jadi pegawai	3 tahun	Musnah
				900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.3.10	Laporan Keuangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
			900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
				900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	1 tahun setelah Diterbitkan	3 tahun	Permanen
				900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	1 tahun setelah Loan Agreement Ditandatangani	3 tahun	Permanen
				900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Musnah
				900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Musnah
				900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.10	Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.11	Report /Laporan	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
				900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1 tahun setelah diperbarui	1 tahun	Permanen
			900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)		Selama masih menjabat	3 tahun	Permanen
			900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
				900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
				900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi	Selama belum ada perubahan	3 tahun	Permanen
				900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
			900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
				900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP- Daftar Perincian Penggunaan SPPR- SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.7.3	Buku Rekening Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening	Selama rekening masih aktif	1 tahun	Permanen
				900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)	Selama rekening masih aktif	5 tahun	Musnah
			900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
			900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)		2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
			900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
				900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	2 tahun sejak Perda tentang pertanggungjawaban APBD disahkan	3 tahun	Musnah
			900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
				900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
				900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen
				900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	2 tahun setelah ditindaklanjuti	3 tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dilunasi	3 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilai kembali
			900.1.12	Anggaran Daerah				
				900.1.12.1	Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah				
				900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)			
				900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)			
			900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan				
				900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP				RETENSI		KETERANGAN	
					AKTIF	INAKTIF		
				900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
			900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
				900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	3 Tahun	7 Tahun	Musnah
				900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)	1 tahun	2 tahun	Musnah
				900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan	2 tahun	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP					RETENSI		KETERANGAN
						AKTIF	INAKTIF	
					evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)			
				900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)	2 tahun	3 Tahun	Permanen

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

